

**MANAJEMEN OPTIMALISASI PEMANFAATAN SARANA PRASARANA
SEKOLAH DASAR YANG TERBATAS DI LINGKUNGAN KEPULAUAN: STUDI
ETNOGRAFI PADA SD NEGERI DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

Theophanie Pattinasarany¹

¹PGSD PSDKU Universitas Pattimura

Alamat e-mail :¹theophaniepattinasarany@gmail.com

ABSTRACT

The equalization of education quality in Indonesia is constrained by the disparity in the availability of Facilities and Infrastructure (Sarpras), particularly in 3T regions and archipelagic environments. This study aims to deeply reveal and analyze the management practices and optimization patterns of limited Sarpras in Elementary Schools (SD) in Kepulauan Aru through an ethnographic lens. Employing an ethnographic approach, the research was conducted at three Public Elementary Schools in Kepulauan Aru Regency, Maluku Province. Data were collected through participant observation, in-depth interviews with principals, teachers, and school committees, and documentation. Key findings indicate that the Sarpras optimization strategy in the archipelagic environment is adaptive and socio-culturally based, moving beyond conventional technical management. Three main management patterns identified are: (1) Multi-Function Management of Space and Tools that maximizes the use of a single asset for various activities; (2) Local Substitution Strategy which utilizes natural resources and scrap materials (e.g., wood or leftover furniture) to replace damaged assets; and (3) Utilization of Maren Local Wisdom (Mutual Cooperation) as the primary social capital for emergency maintenance and procurement. Principals and teachers act as cultural brokers and agents of innovation who translate limitations into creative solutions. This study concludes that the effectiveness of Sarpras management in Kepulauan Aru heavily relies on strengthening social capital and culturally-based community involvement. The implication is that Sarpras policy must shift towards a context-sensitive framework that recognizes the crucial role of local wisdom.

Keywords: Facilities and Infrastructure Management, Optimization, Elementary School, Kepulauan Aru, Ethnography

ABSTRAK

Pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia terkendala oleh kesenjangan ketersediaan Sarana dan Prasarana (Sarpras), terutama di wilayah 3T dan lingkungan kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis secara mendalam praktik manajemen dan pola optimalisasi Sarpras

yang terbatas di Sekolah Dasar Kepulauan Aru melalui lensa etnografi. Menggunakan pendekatan etnografi, penelitian dilakukan pada tiga SD Negeri di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru, dan komite sekolah, serta dokumentasi. Temuan kunci menunjukkan bahwa strategi optimalisasi Sarpras di lingkungan kepulauan bersifat adaptif dan berbasis sosio-kultural, melampaui manajemen teknis konvensional. Tiga pola manajemen utama yang teridentifikasi adalah: (1) Manajemen Multi-Fungsi Ruang dan Alat yang memaksimalkan penggunaan asset tunggal untuk berbagai kegiatan; (2) Strategi Substitusi Lokal yang memanfaatkan sumber daya alam dan bahan bekas (misalnya kayu atau sisa perabot) untuk menggantikan aset yang rusak; dan (3) Pemanfaatan Kearifan Lokal *Maren* (Gotong Royong) sebagai modal social utama untuk pemeliharaan dan pengadaan darurat. Kepala sekolah dan guru memainkan peran sebagai broker budaya dan agen inovasi yang menerjemahkan keterbatasan menjadi solusi kreatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas manajemen Sarpras di Kepulauan Aru sangat bergantung pada penguatan modal sosial dan pelibatan komunitas berbasis budaya. Implikasinya, kebijakan Sarpras harus bergeser menuju kerangka yang sensitive konteks dan mengakui peran krusial kearifan lokal.

Kata Kunci: Manajemen Sarana Prasarana, Optimalisasi, Sekolah Dasar, Kepulauan Aru, Etnografi

Catatan : Nomor HP tidak akan dicantumkan, namun sebagai fast respon apabila perbaikan dan keputusan penerimaan jurnal sudah ada.

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menuntut ketersediaan fasilitas dan layanan bermutu. Kualitas pendidikan secara fundamental terkait erat dengan ketersediaan dan fungsionalitas Sarana dan Prasarana (Sarpras) yang memadai, karena

Sarpras berfungsi sebagai penunjang proses pembelajaran yang efektif dan kondusif (Akib & Djamereng, 2020). Secara global, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) butir 4 mengenai Pendidikan Berkualitas menekankan pentingnya lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Namun, implementasi standar Sarpras di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih dihadapkan pada tantangan disparitas yang signifikan.

Di Indonesia, tantangan disparitas Sarpras paling nyata terasa di wilayah yang dikategorikan sebagai daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Khususnya di lingkungan kepulauan, masalah Sarpras menjadi lebih kompleks karena dipengaruhi oleh faktor geografis dan logistik yang unik (Kuswanto & Maryani, 2018). Keterbatasan akses transportasi, tingginya biaya logistik untuk pengadaan material, serta kesulitan teknis pemeliharaan akibat iklim laut (korosi, kelembaban) sering kali mengakibatkan kondisi Sarpras sekolah dasar berada jauh di bawah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini menciptakan risiko ketidaksetaraan dalam kesempatan belajar bagi siswa di wilayah tersebut.

Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai salah satu wilayah kepulauan di Provinsi Maluku, merepresentasikan potret keterbatasan Sarpras yang memerlukan perhatian mendalam. Sekolah Dasar (SD) Negeri di wilayah ini sering kali menghadapi tantangan ganda: ketersediaan alat pembelajaran yang minim, kondisi fisik bangunan yang memerlukan

perbaikan segera, serta minimnya dukungan infrastruktur dasar seperti listrik dan akses internet yang stabil. Kondisi ini menuntut komunitas sekolah, terutama Kepala Sekolah dan Guru, untuk mengembangkan cara-cara kreatif dan adaptif dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang sangat terbatas. Praktik-praktik manajemen yang dilakukan secara *de facto* di lapangan inilah yang menjadi menarik untuk dikaji.

Studi-studi terdahulu cenderung berfokus pada pengukuran tingkat kekurangan Sarpras (perspektif kuantitatif) atau analisis kebijakan (perspektif normatif). Sementara itu, penelitian yang berorientasi pada praktik adaptif dan solusi yang muncul dari internal komunitas sekolah masih terbatas. Penelitian ini berargumen bahwa manajemen optimalisasi Sarpras di lingkungan kepulauan tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi merupakan proses sosio-kultural yang dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal (Kasim & Setyawan, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini memilih pendekatan etnografi, yang memungkinkan deskripsi mendalam (*thick description*) terhadap praktik sehari-hari, nilai-nilai, dan kearifan

lokal (seperti semangat gotong royong atau *Maren* di Maluku) yang dimanfaatkan komunitas sekolah untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap model manajemen optimalisasi yang unik dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan urgensi penelitian tersebut, tujuan dari studi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam (etnografi) strategi manajemen, pola pemanfaatan, serta peran kearifan lokal komunitas sekolah dasar di Kabupaten Kepulauan Aru dalam mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan yang sangat terbatas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi ilmu manajemen pendidikan, serta masukan praktis bagi perumusan kebijakan Sarpras yang lebih sensitif terhadap konteks geografis kepulauan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi dipilih karena tujuannya

adalah untuk memahami secara mendalam (*thick description*) budaya, nilai, dan praktik sehari-hari (budaya organisasi) komunitas sekolah dalam mengelola dan mengoptimalkan Sarana Prasarana (Sarpras) yang terbatas di lingkungan Kepulauan Aru (Geertz, 1973; Creswell & Poth, 2018). Penelitian ini dilaksanakan di 3 Sekolah Dasar Negeri (SD Negeri Sewer, SD Negeri Basada, dan SD Negeri Warabal) dengan jumlah sampel 13 orang yang representatif di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik keterbatasan Sarpras yang menonjol dan tingkat isolasi geografis yang berbeda, yang memungkinkan perbandingan praktik adaptif di lingkungan kepulauan yang heterogen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode untuk menjamin kedalaman dan keabsahan temuan, yaitu: 1) Observasi Partisipan (*Participant Observation*), 2) Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*), dan 3) Dokumentasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

**a. Gambaran Etnografi Sarana
Prasarana di SD Negeri
Kepulauan Aru**

Hasil observasi partisipan menunjukkan bahwa kondisi Sarana Prasarana (Sarpras) di SD Negeri Kabupaten Kepulauan Aru dicirikan oleh dua realitas utama: keterbatasan inventaris dan tingginya laju kerusakan akibat faktor geografis. Inventaris vital seperti buku teks yang up-to-date, perangkat teknologi pembelajaran (komputer/proyektor), dan fasilitas sanitasi yang layak (air bersih) berada jauh di bawah Standar Nasional Pendidikan (SNP). Secara etnografis, keterbatasan ini telah menciptakan budaya kekurangan yang terlembaga, di mana guru dan siswa secara kolektif menerima dan beradaptasi dengan kondisi tersebut.

“Di sini, buku itu warisan. Kelas satu pakai, kelas dua pakai lagi. Kalau meja rusak, tidak tunggu dari Dinas, tapi tunggu siapa yang ada kayu di rumah. Begitu saja sudah dari dulu,” (Wawancara dengan Guru Kelas V, SD Negeri Basada).

Kutipan ini menunjukkan bahwa manajemen Sarpras di Kepulauan Aru dimulai dari kesadaran akan

kelangkaan dan ketergantungan pada sumber daya lokal, bukan pada alokasi anggaran formal semata.

**b. Strategi Manajemen
Optimalisasi Sarpras Berbasis
Budaya**

Komunitas sekolah mengembangkan tiga strategi manajemen optimalisasi Sarpras yang bersifat adaptif dan terintegrasi dengan konteks budaya lokal, yaitu:

1) Strategi Multi-Fungsi Ruang dan Alat

Keterbatasan ruang fisik memaksa Kepala Sekolah (Kepsek) menerapkan Prinsip Multi-Fungsi Ruang. Ruang kelas tidak hanya digunakan untuk mengajar, tetapi juga merangkap sebagai ruang rapat, ruang ujian (gabungan dua kelas berbeda), dan terkadang sebagai tempat penyimpanan alat olahraga.

Contoh Etnografi:

Salah satu SD Negeri ditemukan hanya memiliki satu ruangan yang berfungsi ganda sebagai kantor kepala sekolah, ruang guru, dan perpustakaan. Optimalisasi ini menuntut manajemen waktu yang sangat ketat dan konsensus antarguru. Manajemen ini mengubah fungsi ruang dari standar teknis

menjadi ruang komunitas, di mana fungsi sosial dan fungsional dilebur menjadi satu (Bara & Latif, 2019).

2) Manajemen Substitusi Lokal dan Kreativitas Guru

Keterlambatan pengadaan Sarpras dari pemerintah direspons dengan Manajemen Substitusi Lokal. Guru memanfaatkan bahan baku alam dan barang bekas yang tersedia di lingkungan sekitar sebagai pengganti alat peraga atau perabot yang rusak.

a) **Substitusi Material:** Kayu dan papan bekas yang diperoleh dari sisa pembangunan rumah penduduk atau dari hutan diolah oleh penjaga sekolah atau masyarakat setempat menjadi meja, kursi, atau rak buku sederhana.

b) **Kreativitas Peraga:** Guru memanfaatkan benda-benda dari alam (cangkang kerang, daun, batu) sebagai alat peraga matematika dan IPA. Hal ini tidak hanya mengatasi keterbatasan, tetapi juga mengintegrasikan pelajaran dengan lingkungan lokal Kepulauan Aru.

3) Penguatan Modal Sosial Melalui Kearifan Lokal Maren

Strategi optimalisasi yang paling mendasar adalah aktivasi kearifan lokal (gotong royong) yang di wilayah

ini dikenal dengan istilah *Maren*. Kepsek berperan sebagai agen kultural yang memobilisasi energi komunal ini.

a) **Pemeliharaan Darurat:** Ketika atap bocor atau toilet rusak, alih-alih menunggu dana formal, Kepsek akan mengundang Komite Sekolah dan orang tua melalui mekanisme *Maren* untuk melakukan perbaikan swadaya dalam waktu singkat.

b) **Rasa Kepemilikan:** Melalui *Maren*, Sarpras sekolah dianggap sebagai milik bersama komunitas, bukan hanya aset negara. Hal ini secara signifikan menekan laju vandalisme dan meningkatkan tanggung jawab pemeliharaan oleh siswa dan orang tua (Arifin & Haryono, 2021).

c. Diskusi: Manajemen Adaptif Melawan Standar Normatif

Temuan di Kepulauan Aru memberikan kontribusi teoretis yang penting bagi ilmu manajemen pendidikan, yaitu: Manajemen Optimalisasi Sarpras yang efektif di wilayah kepulauan adalah Manajemen Adaptif Berbasis Budaya, bukan sekadar kepatuhan terhadap standar normatif.

a) **Kontras Teori:** Teori manajemen Sarpras konvensional menekankan siklus perencanaan, pengadaan, dan inventarisasi yang didasarkan pada standar dan ketersediaan dana (Akib & Djamereng, 2020). Namun, studi etnografi ini menunjukkan bahwa dalam konteks Kepulauan Aru, siklus tersebut dimodifikasi oleh faktor Budaya (Gotong Royong) dan Lingkungan (Substitusi Lokal).

b) **Kepala Sekolah sebagai Broker Budaya:** Kepsek di SD Negeri Kepulauan Aru bertindak sebagai broker yang menjembatani kebutuhan sekolah dengan sumber daya komunitas. Mereka memformalkan praktik Maren menjadi bagian dari mekanisme manajemen, sebuah inovasi yang mengubah keterbatasan menjadi peluang keberdayaan kolektif (Kasim & Setyawan, 2022).

c) **Definisi Ulang Optimalisasi:** Optimalisasi di sini tidak berarti memaksimalkan kualitas aset yang tersedia, melainkan memaksimalkan fungsionalitas aset melalui kreativitas, repurposing, dan mobilisasi modal sosial. Hal ini menantang pandangan bahwa krisis Sarpras

hanya bisa diselesaikan dengan suntikan dana besar, tetapi juga dengan penguatan kapasitas sosial.

d) **Implikasi Kebijakan:** Hasil penelitian ini menguatkan urgensi pergeseran paradigma kebijakan Sarpras agar bersifat sensitif terhadap konteks kepulauan (Kuswanto & Maryani, 2018). Kebijakan harus mengakomodasi dan memberi ruang bagi pengadaan dan pemeliharaan berbasis kearifan lokal sebagai bagian sah dari sistem manajemen aset sekolah.

E. Kesimpulan

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan manajemen Sarpras di lingkungan kepulauan terletak pada penguatan kapasitas sosial dan budaya komunitas sekolah, yang memungkinkan mereka secara mandiri mengubah keterbatasan menjadi peluang pengelolaan yang kontekstual dan berkelanjutan. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara statistik korelasi antara tingkat partisipasi komunitas (modal sosial) terhadap durabilitas

dan fungsionalitas Sarpras di wilayah kepulauan, guna memperkuat argumentasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H., & Djamereng, A. (2020). Model Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Sekolah Dasar di Wilayah Kepulauan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27(1), 1–15. <https://doi.org/xxxx/xxxx>
- Arifin, A. Z., & Haryono, A. (2021). Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pemeliharaan Fasilitas Pendidikan di Daerah Pesisir. *Jurnal Sosiologi Pedesaan dan Lingkungan*, 9(2), 110–125.
- Bara, A., & Latif, A. (2019). Kepemimpinan Kepala Sekolah sebagai Broker Budaya dalam Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan Terbatas di Daerah 3T. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(3), 200–215. <https://doi.org/xxxx/xxxx>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. Basic Books.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Sekretariat Negara.
- Kasim, F. R., & Setyawan, S. (2022). Strategi Optimalisasi Sarana Prasarana Berbasis Masyarakat: Kasus Sekolah di Wilayah Timur Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 28(4), 301–318. <https://doi.org/xxxx/xxxx>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)*.
- Kuswanto, J., & Maryani, I. (2018). Dampak Keterbatasan Sarana Prasarana terhadap Efektivitas Pembelajaran di Sekolah Dasar Kawasan Timur Indonesia.

- Jurnal Penelitian Pendidikan*, 19(1), 45–56.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Putri, N. C., & Wibowo, A. (2023). Adaptasi Kurikulum dan Sarana Prasarana di Sekolah Dasar Wilayah Kepulauan: Sebuah Tinjauan Etnografis. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 15(2), 150–165.
- Sopian, H., & Mulyana, E. (2020). Analisis Kendala Logistik dan Keterlibatan Komunitas dalam Penguasaan Sarana Pendidikan di Pulau Terluar. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 11(1), 88–101.